

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 05.a/HK.03.1-Kpt/5321/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2021.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1763).

Memerhatikan : *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Pendamping;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Tata Laksana;
7. Tim Penataan Manajemen ASN;
8. Tim Penguatan Pengawasan;
9. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
10. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
11. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Betun

Pada Tanggal 03 Maret 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

ttd

MAKARIUS BERE NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Umum

JOHANNES BERGHMANS SERAN



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 05.a/HK.03.1-Kpt/5321/KPU-Kab/III/2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALAKA TAHUN 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KPU KABUPATEN MALAKA TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Makarius Bere Nahak, S.Fil	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; - Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Yosef Nahak, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Yoseph Ruang, S.Fil	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Stefanus Manhitu, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Yuvensius A. Bere, S.Kel	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Yustinus Robert Klau, S.Pt	Sekretaris	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				Birokrasi Sekretariat; – Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait; – Melakukan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; – Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju; – Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya / berjenjang pada akhir tahun; – Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i> ; – Menjadi agen perubahan.
SUB BAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK				
A	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Albert Pieter Djapaole, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	– Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran
2.	Marlinda Kolo, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Yohanes Fericum Raja Sega, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4.	Gusti R. Seran, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	reformasi birokrasi.
5.	Dominggus V . Bere, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Elfrida Maria Hauteas, SE	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
B TIM PENATAAN MANAJEMEN ASN				
1.	Albert Pieter Djapaole, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan assesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Marlinda Kolo, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Yohanes Fericum Raja Sega, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Gusti R. Seran, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Dominggus V . Bere, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Elfrida Maria Hauteas, SE	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
C TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Albert Pieter Djapaole, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian <i>Intern</i> Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan <i>Intern</i> Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
2.	Marlinda Kolo, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Yohanes Fericum Raja Sega, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Gusti R. Seran, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Dominggus V . Bere, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
6.	Elfrida Maria Hauteas, SE	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
D TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Albert Pieter Djapaole, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dan program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Marlinda Kolo, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Yohanes Fericum Raja Seg, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Gusti R. Seran, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Dominggus V . Bere, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Elfrida Maria Hauteas, SE	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT				
A TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Fransiscus Seran S.Kom., M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi
2.	Antonius Yoseph Lay, S.Sos	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3.	Laurensius Nahak Taek	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
4	Tomas Soares	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
B TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Fransiscus Seran S.Kom., M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Antonius Yoseph Lay, S.Sos	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Laurensius Nahak Taek	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Tomas Soares	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
SUB BAGIAN HUKUM				
A TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Johanes B. Seran, A.Md	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
2.	Paulus Bria	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
3	Gaudensius Leki	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA				
A TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Veronika A. Bria, SE	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	Maria Fatima Bria Seo, SST	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
3.	Demeteria Bano Klau, S.Sos	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Primus M Klau Nahak, S.Pd	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
B TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Veronika A. Bria, SE	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.
2.	Maria Fatima Bria Seo, SST	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
3.	Demeteria Bano Klau, S.Sos	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Primus M Klau Nahak, S.Pd	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Betun
 Pada Tanggal 03 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALAKA

ttd

MAKARIUS BERE NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALAKA
 Kepala Sub Bagian Umum

JOHANNES BERGHMANS BERAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALAKA
 NOMOR : 05.a/HK.03.1-Kpt/5321/KPU-Kab/III/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALAKA TAHUN 2021

RENCANA AKSI KEGIATAN
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALAKA TAHUN 2021

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN BULAN													
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Manajemen Perubahan	1 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1 Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan	1 Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi			√											
			2 Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental.	2 Kegiatan kick off (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi			√											
			3 Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas	3 Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal satu tahun sekali				√										
		2 Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1 Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan rencana aksi	1 Kegiatan manajemen perubahan paling sedikit dua kali dalam satu tahun							√							√
			2 Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	2 pemberian pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun										√				
			3 Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal	3 Sosialisasi Kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	1 Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan/produk hukum satuan kerja	1 Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	1 Telah dilakukan indentifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			2 Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	2 Revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN BULAN											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2 Sistem Pengendalian dan penyusunan produk hukum satuan kerja	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Produk Hukum	Jumlah naskah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Penguatan Kelembagaan/organisasi	1 Reorganisasi	1 Klasterisasi Sekretariat	1 Terisnya jabatan struktur dan anggota KPU sesuai Klaster			√	√			√	√	√			
			2 Alih Status	2 Menurunnya jumlah pegawai DPK								√				
4	Penguatan Tata Laksana	1 Perluasan Penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU	1 Pengiriman operator untuk mengikuti pelatihan (SAIBA;SAS;SIMONIKA;SIMPHO NY;SIMAK;SIMAN;SIRUP;SIAP KPU; SAKTI;SMART;E-MONEV;SIDALIH;E-LAPKIN;SIPP;SAPK;SIP-RENJA;SIMPAAW;E-PPID;SIPARMAS;SIPOL)	1 Operator mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat)				√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2 Pengisian berbagai aplikasi	2 100% (seratus persen) aplikasi terisi dengan baik			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2 Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik KPU	1 Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1 Tersedianya struktur PPID di tingkat satuan kerja			√									
			2 Pelaksanaan kegiatan PPID	2 Pemenuhan Permintaan terhadap Informasi dan dokumentasi			√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3 Penyusunan dan Penyampaian Laporan PPID	3 tersedianya laporan pelaksanaan PPID											√	√
		3 Penerapan sistem kearsipan yang handal KPU	1 Penerapan Sistem arsip	1 Arsip statis dan dinamis tertata dengan baik			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2 Kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah	2 Terjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah												
		4 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tata laksana KPU	1 Penyusunan Standar Operasional (SOP)	1 SOP seluruh unit kerja telah tersusun			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2 Pelaksanaan SOP	2 SOP seluruh unit kerja telah dilaksanakan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		5 Perbaikan berkelanjutan program penguatan tata laksana KPU	1 Evaluasi pelaksanaan SOP	1 Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan SOP						√						√
7	Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	1 Sistem rekrutmen	1 Sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (pegawai non PNS)	1 Adanya sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (termasuk untuk pegawai non PNS)											√	√
		2 Penilaian kinerja pegawai	1 Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP	1 Seluruh PNS melaksanakan SKP			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN BULAN											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3 Reward and punishment berbasis kinerja	1 Pemilihan pegawai teladan di lingkungan satuan kerja	1 Terjadinya mekanisme pemilihan pegawai teladan												√
				2 Tersedianya laporan dan dokumentasi kekuatan Pemilihan pegawai teladan												√
			2 Pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan	1 Tersedianya laporan penegakan disiplin												√
		4 Sistem Informasi ASN	1 Melaporkan data Pegawai secara online	1 100% (seratus persen) pengisian Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1 Pemantauan capaian kinerja secara berkala	1 Pelaporan kinerja	1 Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu												
		2 Evaluasi Internal akuntabilitas kinerja	1 Pelaporan akuntabilitas kinerja	1 Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan waktu												
		3 Peningkatan kompetensi akuntabilitas	1 Pelatihan akuntabilitas kinerja	1 Terlaksananya kegiatan pendidikan/bimbingan teknis/pelatihan penyusunan LAKIP dan SAKIP di lingkungan satuan kerja			√									
7	Penguatan Pengawasan	1 Sosialisasi dan Internalisasi Pengawasan	1 Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan kepentingan di lingkungan satuan kerja	1 Terlaksananya Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di lingkungan satuan kerja												
		2 Pembangunan Sistem Pengawasan Intern	1 Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	1 Ditetapkannya keputusan terkait satuan tugas SPIP												
			2 Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi;	1 Terlaksananya kegiatan SPIP			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			a. Menetapkan lingkungan pengendalian	1 Penyampaian laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian				√		√			√			
			b. melakukan penilaian resiko;					√								
			c. melakukan kegiatan pengendalian;					√	√	√	√	√	√	√	√	√
			d. melakukan informasi dan komunikasi pengawasan; dan					√	√	√	√	√	√	√	√	√
			e. melakukan pemantauan pengendalian intern.					√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3 penanganan pengaduan masyarakat	1 pembangunan sistem pengaduan masyarakat	tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN BULAN													
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			2 Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat	tersedianya laporan pengelolaan pengaduan masyarakat			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			3 melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1 penerapan pelayanan satu atap KPU Kabupaten Malaka	1 kebijakan standar pelayanan	1 tersedianya standar pelayanan			√											
			2 Penyusunan maklumat pelayanan	2 Tersidanya maklumat pelayanan			√											
			3 Penyusunan dan pelaksanaan SOP pelayanan	3 Tersedianya SOP pelayanan			√	√	√	√	√	√						
			4 Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat	4 Pelayanan terpadu dalam satu tempat				√										
		2 Penetapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1 pendidikan bagi para pemilih	1 tersedianya dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2 Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	2 Terwujudnya kegiatan yang melibatkan stakeholder			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3 penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional	3 pengelolaan pengaduan masyarakat	1 Dibentukannya helpdesk pengaduan masyarakat			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				2 Tersedianya SOP pelayanan pengaduan			√	√	√	√	√	√	√					
				3 Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk											√	√	√	√
		4 Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	4 Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan	4 Adanya kebijakan di satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/tidak memuaskan														√

Ditetapkan di Malaka
pada tanggal 03 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

ttd

MAKARIUS BERE NAHAK

